

Pengarusutamaan Kemiskinan Dalam Dokumen Perencanaan Penggunaan Anggaran Desa di Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten

Muhammad Emeraldo Zidane, Rutiana Dwi Wahyunengseh

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Politik, Universitas Sebelas Maret

email: muhammad.emeraldz@student.uns.ac.id

Abstrak:

Kemiskinan pedesaan masih menjadi masalah di Indonesia. Menyikapi itu, Pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya salah satunya dengan pengalokasian Dana Desa. Sebagai bagian dari mekanisme, pemerintah menyusun perencanaan dalam bentuk dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes). Kecamatan Trucuk merupakan kecamatan dengan penyumbang angka kemiskinan tertinggi di Kabupaten Klaten. Perkembangan penurunan kemiskinan di Kabupaten Klaten dapat dikatakan baik di wilayah solo raya bahkan mencatatkan penurunan tertinggi. Atas dasar tersebut, penelitian ini ingin melihat perencanaan penggunaan anggaran desa terfokus pada aspek peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa-desa Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten. Penelitian ini menggunakan analisis isi kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Ciri penganggaran *pro-poor* digunakan untuk menganalisis data yang ada. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan studi dokumen, data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan analisis isi dan dibandingkan dengan data wawancara melalui metode Triangulasi. Hasil penelitian menemukan bahwa penganggaran *pro-poor* pada masing-masing desa terfokus pada bidang infrastruktur, jaminan sosial, serta kesehatan. Tidak selarasnya program di RKPDDes dan APBDDes disebabkan oleh keterbatasan anggaran serta pergeseran prioritas program. Kemudian hal yang menjadi penghambat dalam upaya penanggulangan kemiskinan desa setidaknya disebabkan oleh 3 faktor yaitu data yang tidak akurat, anggaran yang terbatas, serta budaya masyarakat.

Kata Kunci: Penganggaran *Pro-Poor*, Desa, Kemiskinan

Abstract:

Rural poverty is a problem in Indonesia. In response to this, the Indonesian Government has made various efforts, one of which is by allocating Village Funds. As part of the mechanism, the government prepares plans in the form of Village Government Work Plan (RKPDDes) and Village Revenue and Expenditure Budget (APBDDes) documents. Trucuk District is the highest poverty rate in Klaten Regency. Poverty reduction in Klaten Regency is one of the best in the Solo Raya area and even recorded the highest decline. Therefore, this research wants to see planning for the use of village budgets focused on aspects of improving community welfare in villages in Trucuk District, Klaten Regency. This research uses qualitative content analysis with a descriptive approach. Pro-poor budgeting characteristics are used to analyze existing data. Data collection uses interview and document study methods. The collected data will be analyzed using content analysis and compared with interview data using the Triangulation method. The research results found that pro-poor budgeting in each village focused on infrastructure, social security and health. The misalignment of programs in the RKPDDes and APBDDes is caused by

budget limitations and shifts in program priorities. Then the things that become obstacles in efforts to overcome village poverty are caused by at least 3 factors, namely inaccurate data, limited budget, and community culture.

Keywords: Pro-Poor Budgeting, Village, Poverty

Pendahuluan

Pemerintah Indonesia berusaha untuk menurunkan angka kemiskinan. Hal tersebut terbukti jika melihat persentase penduduk miskin Indonesia dari beberapa tahun belakangan. Mengacu dari data Badan Pusat Statistik, pada Maret 2011 terdapat sekitar 30,2 juta jiwa atau 12,49% penduduk miskin. Kemudian jumlah tersebut terus menurun hingga menyentuh angka 24,78 juta jiwa atau 9,22% pada September 2019. Kemudian jumlah tersebut sedikit meningkat diakibatkan oleh dampak pandemi Covid-19 yang menghambat perekonomian masyarakat. Terakhir, angka kemiskinan di Indonesia menyentuh angka 26,16 juta jiwa atau 9,57% pada September 2022. Namun demikian masih terdapat kesenjangan kemiskinan perkotaan dan pedesaan. Sampai dengan akhir september 2022, BPS mencatat persentase kemiskinan di wilayah perkotaan sebesar 7,53% sedangkan sebesar 12,36% kemiskinan berada di wilayah pedesaan.

Pengarusutamaan kemiskinan merupakan suatu upaya penting dalam pembangunan berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya tersebut terlihat dengan disahkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa di mana salah satu poinnya mengatur tentang Dana Desa. Dana Desa kemudian menjadi salah satu sumber pendapatan yang membiayai program di APBDes Secara umum pengalokasian Dana Desa bertujuan menurunkan angka kemiskinan serta mewujudkan masyarakat desa yang sejahtera melalui kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. (Humas Setkab RI,2022). Hal tersebut diperkuat dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 di mana salah satu tujuan penggunaan Dana Desa adalah mewujudkan desa tanpa kemiskinan.

Selama keberjalanannya, Dana Desa berdampak pada pembangunan Desa. selain itu Dana Desa juga berdampak pada Indeks Desa Membangun (IDM). Indeks Desa Membangun merupakan ukuran untuk menilai tingkat kemandirian desa melalui Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun. Semakin tinggi tingkat IDM maka kesejahteraan meningkat. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mencatat dalam tiga tahun terakhir dari 2019 hingga 2021, terjadi perbaikan predikat desa dengan semakin banyaknya desa dengan predikat maju. Peningkatan Indeks Desa Membangun

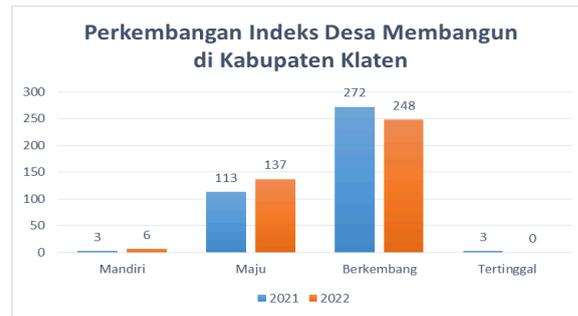
juga secara tidak langsung berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan terhadap suatu desa. Indeks Desa Membangun memiliki korelasi negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Artinya jika nilai IDM suatu desa tinggi, maka tingkat kesejahteraan di desa tersebut semakin meningkat (Fasya dkk, 2020). Maka dari itu, secara tidak langsung Dana Desa pengaruh positif bagi upaya penurunan kemiskinan. Hal tersebut juga diperkuat dengan hasil penelitian bahwa berperan positif terhadap menurunnya tingkat kemiskinan di desa. Semakin besar Dana Desa yang diberikan maka semakin menurun pula tingkat kemiskinan (Arfiansyah, 2020). Yang (2019) dalam penelitiannya menemukan bahwa pengalokasian dana desa dengan ambang tertentu memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dalam konteks penganggaran desa tentu berkaitan dengan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. jika kita kaitkan dengan konsep pengarusutamaan kemiskinan, alokasi anggaran yang ditujukan terhadap kebijakan yang berdampak terhadap kesejahteraan dan terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat atau dikenal dengan *pro-poor budgeting* (Rinusu dalam Padriyansyah, 2015). Pada penelitian sebelumnya, kebijakan dan alokasi anggaran desa yang tidak mempertimbangkan aspek pengarusutamaan kemiskinan dapat memperburuk ketimpangan dan membatasi peluang pemulihan ekonomi bagi masyarakat yang terpinggirkan (Ikhsan dkk, 2022).

Jawa Tengah merupakan salah satu wilayah di Jawa dengan penurunan kemiskinan pedesaan nomor dua setelah Banten yaitu sebesar 0,39% (BPS, 2022). Jika melihat di lingkup yang lebih kecil, salah satu wilayah dengan penurunan kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah adalah Kabupaten Klaten dengan angka 1,16% (BPS, 2022). Selain itu, Kabupaten Klaten merupakan satu satunya dari 10 kabupaten termiskin yang mencatatkan peningkatan kemiskinan di angka 0,6% bersama Purworejo (0,62%), Kab. Magelang (0,64%), dan Wonogiri (0,69%) tepatnya antara tahun 2020-2021 (BPS, 2022). Dari hasil ini, Pemkab Klaten akan melakukan kajian mengenai penurunan kemiskinan ini. menurut Pelaksana Tugas Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Klaten, M. Nasir, mengatakan bahwa pemkab perlu melakukan kajian mengenai penurunan kemiskinan ini untuk mengetahui lebih detail terkait dari sisi mana program yang telah dijalankan bisa optimal memengaruhi penurunan kemiskinan tersebut (Solopos, 2022). Dari segi kebijakan, pemerintah Kabupaten Klaten juga telah menerbitkan peraturan di mana salah satu poin di dalamnya berkaitan dengan upaya penanggulangan kemiskinan. Dalam Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Bupati Klaten Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan dan Prioritas Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Klaten Tahun 2022 mengatur tentang prioritas penggunaan Dana Desa di mana salah satu poinnya adalah menciptakan desa tanpa kemiskinan melalui penanggulangan kemiskinan.

Selain itu jika melihat tingkat Indeks Desa Membangun, Kabupaten Klaten juga mencatatkan perkembangan positif dalam hal pembangunan desa yang dilihat dari Indeks Desa Membangun.

Grafik 1. 1
Perkembangan IDM Kabupaten Klaten



Sumber: SIDesa Jawa Tengah, 2022 diambil dari <https://sidesa.jatengprov.go.id/>

Dapat dilihat pada grafik di atas bahwa terjadi peningkatan pada desa dengan kategori Maju dan Mandiri. Namun, kemiskinan di Klaten masih salah satu yang tertinggi di Solo Raya setelah Sragen. Salah satu wilayah dengan kemiskinan tertinggi Klaten berada di Kecamatan Trucuk. Berdasarkan data P3KE pada tahun 2023 yang diunggah di laman <http://p3ke.kemenkopmk.go.id/>. (diakses pada 24 September 2023), Terdapat 13.007 keluarga miskin atau sekitar 47.654 jiwa penduduk miskin. Jumlah ini merupakan yang tertinggi di Kabupaten Klaten.

Atas dasar tersebut, penelitian ini hendak mengetahui penggambaran *pro-poor budgeting* yang terdapat dalam dokumen perencanaan anggaran desa meliputi RKP Desa dan APB Desa sekaligus membandingkan penganggaran di antara desa berkategori Maju dan Berkembang berdasarkan Indeks Desa Membangun di Kecamatan Trucuk. Untuk mengetahui hal tersebut, terlebih dahulu kita harus memahami kriteria apa saja yang menggambarkan *pro-poor*: LGSP-USAID dalam Padriansyah (2015) dan Bank Dunia dalam Nursini dkk (2018) menyebutkan ada lima ciri anggaran yang berpihak pada pengentasan kemiskinan. Selain itu terdapat beberapa peraturan pemerintah yang mengatur tentang penanganan kemiskinan seperti UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Permendes PDTT No. 21 Tahun 2020, hingga Permendes PDTT No. 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022. Dari ke semua itu lalu dirumuskan penganggaran yang *pro-poor* memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Pemenuhan kebutuhan dasar (Sandang, pangan, papan);
- b) Terpenuhinya infrastruktur publik;

- c) Pemberdayaan masyarakat, bantuan modal dan penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
- d) Perlindungan sosial;
- e) Penyediaan lapangan kerja;
- f) Pendataan informasi tentang masyarakat miskin serta kebutuhannya.

Metode Penelitian

Penelitian dilaksanakan di wilayah Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah Lokasi Penelitian: Pengambilan sampel menggunakan teknik *stratified random sampling* dan kemudian didapatkan 4 desa kategori maju dan 4 desa kategori berkembang berdasarkan Indeks Desa Membangun.

Tabel 2. 1
Daftar Desa yang Dijadikan Lokasi Penelitian

Kategori Berkembang	Kategori Maju
Desa Kalikebo	Desa Trucuk
Desa Karangpabel	Desa Gaden
Desa Pundungsari	Desa Bero
Desa Sabranglor	Desa Mandong

Jenis Penelitian ini Kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian menekankan pada makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2013). Penelitian ini menggunakan data primer yang diambil melalui wawancara terhadap perangkat desa serta data sekunder diambil melalui studi dokumen terhadap RKPDes dan APBDes 2022. Uji Validitas menggunakan jenis validitas muka dan triangulasi data. Uji Reliabilitas menggunakan jenis reliabilitas reproduksibilitas.

$$\text{Reliabilitas: } \frac{A}{N}$$

Keterangan:

A, jumlah persetujuan dari dua orang *coder*:

N, Jumlah unit yang dites

Hasil perhitungan sebagai berikut:

- a. Pada dokumen RKP Desa Bero 2022
Reliabilitas: $35/35 = 1$ (100%)
- b. Pada Dokumen APB Desa Bero 2022
Reliabilitas: $14/14 = 1$ (100 %)

Riffle dkk dalam Eriyanto (2011) berpendapat bahwa reliabilitas yang dapat diterima setidaknya mencapai angka 0,8 (80%). Jika hasil perhitungan dibawah standar tersebut, dapat dikatakan tidak reliabel.

Analisis yang dilakukan menggunakan Analisis Isi Kualitatif. Analisis isi kualitatif sebagai metode yang secara sistematis menggambarkan makna dari material-material yang dalam hal ini berupa konten atau teks. Drisco dan Maschi (2016). Analisis isi kualitatif lebih fleksibel dan tidak seketat kuantitatif (Schreier, 2012). Dari beberapa karakteristik penganggaran yang *pro-poor* akan disusun menjadi kerangka koding. Kerangka koding yang telah diuji reliabilitasnya kemudian digunakan untuk menganalisis dokumen RKPDes dan APBDes yang telah terkumpul untuk mengetahui penggambaran *pro-poor* di dalam dokumen tersebut.

Pembahasan

A. Program-Program Di Antara Desa Maju dan Berkembang

1) Papan

Program pertama yang sering muncul adalah program terkait pemenuhan kebutuhan papan melalui program perbaikan/rehab terhadap rumah tidak layak huni (RTLH). Mayoritas desa dengan kategori berkembang menganggarkan program tersebut. Hanya 2 desa yang tidak, yaitu Desa Pundungsari dan Desa Sabranglor yang merupakan desa dengan kategori IDM Berkembang. Dari wawancara yang dilakukan terhadap sekretaris Desa Pundungsari, tidak dianggarkannya program RTLH dikarenakan sudah sedikitnya rumah dengan kategori tidak layak. Sementara menurut Sekretaris Desa Sabranglor, tidak adanya program tersebut dikarenakan tidak adanya anggaran untuk mencukupi bidang tersebut.

2) Kesehatan

Program berikutnya yang selalu muncul baik di desa kategori berkembang maupun kategori maju adalah program di bidang kesehatan. Program terkait dengan hal tersebut berupa Pos Kesehatan dan Posyandu desa. Kegiatan yang sering dilakukan adalah Pemberian Makanan Tambahan (PMT). PMT merupakan salah satu upaya dalam pencegahan stunting. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016. *Stunting* merupakan permasalahan gizi pada balita yang menyebabkan gangguan pada tinggi dan berat badan (Waroh, 2019). Menciptakan masyarakat bebas *stunting* merupakan upaya mewujudkan desa sehat dan sejahtera. Itu berarti satu langkah dalam upaya memutus kemiskinan dengan meningkatkan kualitas SDM melalui kesehatan. Hal tersebut sesuai dengan ciri kemiskinan yang diungkapkan oleh Suharto (2013) di mana salah satu ciri kemiskinan adalah rendahnya kualitas SDM. Di samping itu, pencegahan *stunting* merupakan salah satu prioritas dalam penggunaan Dana Desa tahun 2022 yang diatur pada Pasal 6 Ayat (2) Permendes PDTT No. 7 Tahun 2021.

3) Pendidikan

Program berikutnya yang sering muncul adalah program di bidang pendidikan. Kegiatan yang berkaitan dengan program tersebut adalah penyelenggaraan kegiatan PAUD. Anggaran yang dipergunakan untuk kegiatan PAUD dialokasikan untuk perbaikan sarana PAUD seperti gedung dan melengkapi fasilitas kegiatan pembelajaran seperti loker/laci, alat peraga dalam pembelajaran.

4) Perlindungan sosial

Perlindungan sosial yang dimaksud dilaksanakan dalam bentuk pemberian Bantuan Langsung Tunai. Baik desa berkembang maupun desa maju menganggarkan kegiatan tersebut walaupun besarnya berbeda-beda. Hal tersebut didasari oleh Permendes PDPT No.7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 di mana salah satu prioritas Dana Desa adalah penanganan kemiskinan melalui pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT).

5) Pemberdayaan, peningkatan UMKM dan bantuan modal

Untuk desa berkembang maupun maju menganggarkan program berkaitan dengan produksi tanaman pangan maupun peternakan. Program tersebut dilakukan dalam bentuk pemberian bantuan pupuk serta pemberian hewan ternak untuk dikelola. Hal tersebut berkaitan dengan panduan penggunaan Dana Desa. Dalam Pasal 5 Ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 menyatakan bahwa penggunaan Dana Desa diperuntukkan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan besaran minimal 40%, ketahanan pangan dan hewani dengan besaran minimal 20%, kemudian untuk penanganan Covid-19 serta sektor lainnya. Berdasarkan hasil wawancara terhadap sekretaris desa khususnya dari Desa Trucuk, Desa Sabranglor, Desa Gaden, dan Desa Bero, mereka mengkonfirmasi bahwa program terkait produksi tanaman pangan maupun peternakan merupakan program ketahanan pangan yang memang telah diinstruksikan dari peraturan yang di atas.

Selain program-program peningkatan produksi tanaman pangan dan peternakan, kesamaan lainnya adalah terkait program pelatihan dan penguatan terhadap penyandang difabel. Secara langsung atau tidak, program tersebut dapat terhadap upaya memutus kemiskinan. Menurut Chambers (1995), kemiskinan yang sifatnya multidimensi salah satunya disebabkan oleh kekurangan fisik seperti cacat fisik dapat berimplikasi pada penurunan produktivitas. Dengan program tersebut, diharapkan kaum difabel dapat berdaya dengan berbagai keterampilan yang dikuasai.

Untuk desa kategori maju juga menganggarkan program berkaitan dengan usaha peningkatan UMKM desa melalui pendampingan terhadap kelompok usaha ekonomi produktif. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah

Desa Bero dan Pemerintah Desa Mandong. Desa Bero memberikan bantuan modal berupa janur plastik terhadap kelompok pengrajin anyaman plastik. Sementara itu untuk desa berkembang, peningkatan UMKM desa dilaksanakan melalui peningkatan fasilitas kuliner desa terkhusus di Desa Kalikebo.

6) Pengumpulan Informasi Tentang Orang Miskin dan Menilai Kebutuhan Orang Miskin

Program yang terkait dengan bidang ini adalah program Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Secara Partisipatif yang merupakan bagian dari program pemerintah. Dari keseluruhan desa yang dijadikan sampel dalam penelitian ini, hanya 3 desa yang menganggarkan program tersebut. Desa-desanya meliputi Desa Gaden (Maju), Desa Mandong (Maju), dan Desa Kalikebo (Berkembang). Dari hasil wawancara terhadap masing-masing sekretaris desa, program tersebut berkaitan dengan SDGs Desa. Salah satu fokus dari SDGs Desa adalah menciptakan desa tanpa kemiskinan. Program tersebut bertujuan untuk memperbarui data kemiskinan desa.

7) Infrastruktur

Dari desa-desa yang diteliti, terdapat kesamaan desa berkembang maupun desa maju. Mayoritas infrastruktur yang dibangun merupakan infrastruktur jalan desa, jalan permukiman, dan Jalan Usaha Tani. Kegiatan lain berupa pemeliharaan saluran irigasi yang dilakukan di Desa Sabranglor (Berkembang), Desa Mandong (Maju), dan Desa Pundungsari (Berkembang). Pembangunan sanitasi berupa jamban dan saluran pembuangan limbah seperti di Desa Sabranglor (Berkembang), Desa Karangpakel (Berkembang), dan Desa Gaden (Maju). Sementara pembangunan infrastruktur air bersih terdapat di Desa Kalikebo (Berkembang).

Kegiatan pembangunan tersebut dilakukan secara swakelola oleh pihak desa. Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh perangkat desa yang diwawancarai. Selain itu, kegiatan tersebut juga melibatkan partisipasi masyarakat setempat. Partisipasi yang dilakukan ada yang bersifat swadaya atau gotong royong serta terdapat juga yang dilaksanakan dengan sistem padat karya. Artinya, masyarakat dilibatkan dalam proses tersebut dan dibayar atau dikenal dengan Padat Karya Tunai. Padat Karya Tunai merupakan salah satu hal yang diutamakan dalam sistem swakelola. Hal tersebut telah tercantum dalam Pasal 8 Permendes PDTT No. 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022. Melalui program Padat Karya Tunai, masyarakat yang terlibat tentu akan mendapatkan pemasukan utamanya masyarakat yang sedang menganggur. M Gomezulu & Chitete (2023) menemukan bahwa sistem padat karya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur berdampak positif dan cukup signifikan terhadap peningkatan kekayaan/akumulasi aset.

Dari program-program yang telah dipaparkan, dapat dilihat bahwa terdapat beberapa kemiripan dari desa ke desa. Hal tersebut karena beberapa program *pro-poor* yang tercantum dalam penganggaran desa merupakan mandat/ program yang diinstruksikan dari pusat. Adapun beberapa program yang berbeda merupakan program yang muncul dari masing-masing stakeholder yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Dari pemaparan tersebut juga terdapat kesamaan dengan perencanaan penggunaan anggaran di wilayah lain. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Nursini, Agussalim, Sultan Suhab, dan Tawakkal (2018). Penelitian tersebut meneliti perwujudan *pro-poor* perencanaan dan penganggaran Pemerintah Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan. Perwujudan *pro-poor* dalam dokumen perencanaan Kabupaten Bone meliputi program jaminan dan perlindungan sosial, program pemberdayaan masyarakat, serta program pemberdayaan usaha mikro dan kecil.

B. Perbedaan Program antara RKP Desa dan APB Desa

Jika kita melihat perbandingan antar program yang tercantum di dalam RKPDes dan di dalam APBDes. Terdapat beberapa program yang tercantum dalam RKPDes namun tidak tertuang dalam APBDes ataupun sebaliknya. Seperti yang terlihat pada bidang infrastruktur, jumlah program di RKPDes tidak selalu sejalan dengan APBDes. Begitupula yang terjadi pada bidang kesehatan di Desa Pundungsari. Hal demikian juga terjadi pada desa-desa dengan predikat maju. Terdapat beberapa program yang tercantum dalam RKPDes namun tidak tertuang dalam APBDes ataupun sebaliknya. Seperti yang terlihat pada bidang infrastruktur, jumlah program di RKPDes tidak selalu sejalan dengan APBDes. Begitupula yang terjadi pada bidang kesehatan dan bidang pemberdayaan.

a) Desa Pundungsari

Dalam dokumen RKPDes dan APBDes Desa Karangpakel juga terdapat perbedaan seperti program permodalan awal untuk simpan pinjam yang tidak tercantum di APBDes. Menurut Sekretaris Desa Pundungsari, perbedaan tersebut disebabkan karena ada kegiatan lain yang datang tiba-tiba serta penting untuk dilaksanakan. Hal tersebut menyebabkan beberapa program tergeser.

b) Desa Sabranglor

Dalam dokumen RKPDes dan APBDes Desa Sabranglor juga terdapat perbedaan. Salah satu perbedaan tersebut yaitu tidak tercantumnya program RTLH dan pembuatan WC keluarga di APBDes walaupun program tersebut telah masuk rencana RKPDes. Terkait dengan hal tersebut, Sekretaris Desa Sabranglor menjelaskan perbedaan tersebut disebabkan karena tidak adanya pendanaan terhadap program yang dimaksud. Selain itu, terdapat kegiatan

lain yang memiliki urutan prioritas teratas sehingga menggeser program yang sebelumnya telah direncanakan.

c) Desa Trucuk

Dalam dokumen RKPDes dan APBDes Desa Trucuk juga terdapat perbedaan. Salah satu perbedaan tersebut yaitu tidak tercantumnya program peningkatan ekonomi UMKM, jambanisasi dan Pamsimas di APBDes walaupun program tersebut telah masuk rencana RKPDes. Terkait dengan hal tersebut, Sekretaris Desa Trucuk menjelaskan perbedaan tersebut disebabkan keterbatasan anggaran untuk mengakomodir seluruh program yang telah ditampung. Oleh karena itu diterapkanlah skala prioritas. Program-program yang dimaksud kemungkinan tidak termasuk skala prioritas. Namun demikian hal tersebut juga dapat disebabkan karena pendanaan yang tidak turun pada program yang dimaksud.

d) Desa Gaden

Dalam dokumen RKPDes dan APBDes Desa Gaden juga terdapat perbedaan. Salah satu perbedaan tersebut yaitu tidak tercantumnya program seperti pelatihan kewirausahaan (UMKM) dan Pelatihan pembuatan kerajinan di APBDes walaupun program tersebut telah masuk rencana RKPDes. Terkait dengan hal tersebut, Sekretaris Desa Gaden mengatakan bahwa tidak semua yang ada di RKPDes dituangkan dalam APBDes. Hal tersebut terkait dengan keterbatasan anggaran yang tidak memungkinkan untuk mengakomodasi semua program. Maka dari itu, desa mencari sumber dana lain dengan mengajukan proposal ke dinas-dinas terkait. Bapak Dwi juga mengatakan bahwa tidak selamanya program yang tidak tertuang dalam APBDes namun telah masuk dalam RKPDes merupakan program-program yang tidak terpihaki oleh anggaran. Hal tersebut dimungkinkan kalau program tersebut mendapat bantuan/hibah yang tidak mewajibkan program tersebut untuk dicantumkan dalam APBDes.

e) Desa Bero

Dalam dokumen RKPDes dan APBDes Desa Bero juga terdapat perbedaan. Salah satu perbedaan tersebut yaitu tidak tercantumnya program beasiswa untuk siswa miskin berprestasi, bantuan listrik dan beberapa program pelatihan di APBDes walaupun program tersebut telah masuk rencana RKPDes. Sekretaris Desa Bero, Ibu Luluk Fajri, M.Pd menjelaskan bahwa tidak dituangkannya program tersebut di APBDes tidak adanya pendanaan yang masuk dari pihak ketiga. Selain faktor tersebut, hal lain yang disampaikan beliau adalah kewajiban desa untuk mengakomodir program-program wajib yang telah diatur oleh pusat melalui seperti dari kementerian keuangan dan sebagainya. Pada akhirnya, anggaran yang diberikan terfokus untuk mengakomodir program-program tersebut dan sisa

anggaran tidak mencukupi untuk membiayai program yang memang datang dari usulan masyarakat.

C. Besaran Anggaran *Pro-Poor* di antara Desa Maju dan Berkembang

Tabel 3. 1

Rekapitulasi Rincian Persentase Anggaran Pada APB Desa

Desa		Papan	Kesehatan	Pendidikan	Pengumpulan Informasi Tentang orang miskin dan menilai kebutuhan orang miskin	Perlindungan Sosial	Pemberdayaan, Bantuan Modal, Penguatan UMKM	Infrastruktur
Predikat	Nama							
Berkembang	Kalikebo	1,71%	1,99%		0,11%	16,96%	3,59%	32,47%
Berkembang	Karangpapel	4,33%	2,15%			16,56%	0,46%	28,82%
Berkembang	Pundungsari		1,50%			15,16%	0,35%	4,48%
Berkembang	Sabranlor		3,66%	1,12%		14,54%	0,51%	27,11%
Maju	Trucuk	3,76%	2,08%	1,12%		16,61%	3,14%	20,10%
Maju	Gaden	9,01%	3,82%	0,92%	0,47%	19,00%	0,37%	18,46%
Maju	Bero	3,47%	3,91%	0,18%		20,13%	2,46%	28,17%
Maju	Mandong	0,90%	2,47%	0,97%	0,27%	19,56%	1,99%	15,84%

Sumber: Hasil olah data sekunder

Tabel tersebut berisi rekapitulasi besaran anggaran pada desa dengan predikat berkembang dan maju berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM). Prioritas anggaran mayoritas berada pada aspek infrastruktur. Hal ini sejalan dengan banyaknya jumlah program pada bidang infrastruktur. Selain program infrastruktur, prioritas yang menjadi kesamaan di antara desa maju dan berkembang adalah bidang perlindungan sosial yang diwujudkan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). Di samping program infrastruktur dan perlindungan sosial, program lain yang menjadi prioritas dari segi anggaran adalah bidang kesehatan. Baik desa maju maupun berkembang memperhatikan bidang kesehatan. Selain fokus pada pemberian perlindungan sosial hingga kesehatan, kriteria lainnya yang menjadi fokus terletak pada penyediaan tempat tinggal yang layak di mana mayoritas besaran anggaran berada di atas 3%. Meskipun tidak semua desa mencantumkan program tersebut khususnya pada desa Berkembang seperti Sabranlor dan Pundungsari karena tidak adanya anggaran yang masuk serta tidak menjadi kebutuhan yang harus segera dipenuhi.

Setelah membahas program-program yang menjadi prioritas, terdapat program yang mendapatkan porsi anggaran yang lebih kecil dibandingkan dengan kriteria lain seperti pendidikan, pemberdayaan dan pengumpulan informasi tentang orang miskin. Penyediaan layanan pendidikan merupakan salah satu program yang mendapat alokasi anggaran yang kecil. Secara rata-rata keseluruhan, persentase anggaran hanya dibawah 1% yaitu sebesar 0,86%. Meskipun pada kategori desa maju menganggarkan bidang tersebut, namun persentasenya kecil. Kriteria pemberdayaan, bantuan modal serta penguatan usaha mikro/UMKM juga merupakan kriteria mayoritas mendapatkan porsi

anggaran yang kecil. Hanya 3 desa yang memiliki persentase anggaran di atas 2% di mana satu di antaranya adalah desa Berkembang. Sisanya berada bawah 1% yang didominasi desa berkembang dan satu dari desa maju yaitu Desa Gaden. Selain kriteria tersebut, kriteria lain yang tidak menjadi fokus bagi pemerintah desa adalah kriteria yang berkaitan dengan pengumpulan informasi tentang orang miskin. Dari keseluruhan desa, hanya 3 desa yang memperhatikan program tersebut

D. Hambatan dalam penanggulangan kemiskinan.

Pada subbab sebelumnya telah ditunjukkan program-program pro-poor pada masing-masing desa. Namun demikian, secara keseluruhan tingkat kemiskinan di keseluruhan desa masih di atas 60%. Berikut ini merupakan pandangan dari masing masing desa terkait dengan kendala yang dihadapi dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

a) Desa Kalikebo

Sekretaris Desa Kalikebo, Bapak Joko Purwanto mengatakan tidak ada kendala berarti dalam penanggulangan kemiskinan di desanya. Namun, beliau mengatakan bahwa dalam menurunkan tingkat kemiskinan tidak bisa dilakukan secara cepat. Ketika ditanya terkait anggaran, beliau mengatakan tidak ada masalah dengan itu karena menurut beliau sudah mencukupi.

b) Desa Karangpaku

Sekretaris Desa Karangpaku, Bapak M. Ihrom, S.Ag. mengatakan bahwa hambatan selalu ada dalam penanggulangan kemiskinan di desanya. Salah satu hambatan itu berkaitan dengan anggaran. Ketika ditanya terkait anggaran, beliau mengatakan bahwa anggaran yang ada belum mencukupi untuk membiayai program-program tersebut.

c) Desa Pundungsari

Sekretaris Desa Pundungsari, Bapak Ngadino Ali Mustofa, S.AP. menyadari bahwa tingkat kemiskinan berdasarkan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) di desanya termasuk tinggi. Menurut beliau, Dana Desa yang diterima diupayakan untuk mengurangi kemiskinan di desanya. Namun demikian, beliau menyampaikan satu hal yang selama ini menjadi hambatan dalam upaya penanggulangan kemiskinan tersebut. Beliau mengatakan bahwa masyarakat sulit merubah status hidup mereka. Selain itu menurut beliau masyarakat merasa senang dimiskinkan terutama ketika ada bantuan yang datang. Selain hambatan tersebut, beliau mengisyaratkan bahwa salah satu yang menjadi hambatan adalah masih terdapatnya bantuan yang tidak tepat sasaran.

d) Desa Sabranglor

Sekretaris Desa Sabranglor, Ibu Sandi Danar mengatakan bahwa hambatan yang terjadi dalam upaya penanggulangan kemiskinan lebih

kepada data yang tidak akurat. Tidak terdapat sinkronisasi antara data di desa dengan data yang tersimpan dari pusat. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya bantuan yang tidak tepat sasaran.

e) Desa Trucuk

Sekretaris Desa Trucuk, Bapak Paryono mengatakan bahwa tidak ada kendala yang sangat berarti dalam upaya penanggulangan kemiskinan di desanya. Menurut beliau program-program khusus terkait penanggulangan kemiskinan merupakan program yang telah diinstruksikan dari tingkat di atas. Namun demikian jika harus menyebutkan satu hambatan, Bapak Paryono mengatakan bahwa data menjadi kendala dalam upaya penanggulangan kemiskinan di desanya.

f) Desa Gaden

Sekretaris Desa Gaden, Bapak Dwi Raharjo mengatakan bahwa tingginya DTKS di Desa Gaden tidak serta merta bahwa semuanya miskin. Ada beberapa warga yang sebenarnya telah dicoret dari daftar penerima bantuan karena dari pusat telah melihat bahwa penerima tersebut sudah diluar kriteria penerima. Namun para penerima yang telah dicoret tetap mengajukan diri untuk kembali dimasukkan. Oleh karena itu data menjadi salah satu hambatan. Beliau juga berharap adanya sinkronisasi data dengan data di pusat. Menurut beliau, dengan adanya sinkronisasi tersebut, DTKS yang ada akan berkurang sehingga menyisakan pihak-pihak yang benar-benar membutuhkan bantuan.

g) Desa Bero

Sekretaris Desa Bero, Ibu Luluk Fajri, M.Pd. mengatakan bahwa hambatan dalam penanggulangan kemiskinan di desanya berkaitan dengan anggaran. Menurut beliau, banyak program yang ingin dimasukkan. Namun keterbatasan anggaran menyebabkan semua program tidak mungkin dilaksanakan. Oleh karena itu hanya yang benar-benar miskin yang mendapat prioritas.

h) Desa Mandong

Sekretaris Desa Mandong, Bapak Joko Wiranto, S.T. mengatakan bahwa secara fasilitas, desa mampu untuk menurunkan angka kemiskinan. Selain itu, Dana Desa juga boleh dipergunakan untuk kegiatan pemberdayaan kalau memang ada yang mengusulkan. Akan tetapi, kendala atau hambatan yang juga terjadi justru muncul dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat cenderung menerima apa adanya dan tidak berusaha lebih untuk meningkatkan perekonomian mereka. Hal tersebut disampaikan Bapak Joko. Menurut beliau, masyarakat menjadi termanjakan dengan aneka bantuan dan sulit untuk diajak berusaha dari nol.

Beliau menceritakan bahwa selama ini Desa Mandong telah memberikan stimulan kepada masyarakat untuk membangun usahanya sendiri. Stimulan tersebut diberikan dalam bentuk bibit tanaman, pupuk, dan bibit ikan yang harapannya dapat dikelola oleh masyarakat serta dapat menjadi sumber pendapatan. Namun dari sejumlah orang penerima, hanya segelintir yang masih konsisten menjalankan usahanya. Sisanya berhenti karena merasa rugi dan malas.

Jika kita melihat realita yang terjadi di Desa Mandong di mana salah satu faktor kemiskinan justru datang dari masyarakatnya, hal itu dapat kita kaitkan dengan dimensi budaya dalam kemiskinan. Seperti diketahui, kemiskinan merupakan masalah multidimensi. Artinya permasalahan itu disebabkan oleh banyak dimensi. Setidaknya kemiskinan dipandang dari tiga dimensi yaitu dimensi ekonomi, dimensi sosial, dan dimensi budaya. Dimensi budaya dapat dilihat dari tujuh indikator, (1) tingkat kedisiplinan yang tinggi di masyarakat; (2) kebiasaan hidup sehat dan bersih; (3) budaya rajin dan bekerja keras; (4) kebiasaan hidup hemat dan menabung; (5) selalu ingin maju; (6) sikap pantang menyerah; (7) memiliki sikap mandiri (Rustanto, 2015).

Jika kita kaitkan dengan pernyataan Sekretaris Desa Mandong terkait dengan sifat dan sikap masyarakatnya, maka indikator dari dimensi budaya yang sesuai adalah selalu ingin maju dan sikap pantang menyerah. Beberapa masyarakat di Desa Mandong lebih memilih bekerja sebagai buruh pabrik meskipun dengan upah seadanya. Hal ini dapat dimaknai sebagai ketiadaan sifat untuk selalu maju. Mereka lebih memilih berada di zona nyaman meski hal itu membuat nasib mereka tidak berubah. Kemudian, banyaknya warga penerima bantuan usaha yang berhenti memperlihatkan tidak adanya sikap pantang menyerah.

Penutup

Secara keseluruhan perwujudan program *pro-poor* di antara desa kategori IDM Maju dan Berkembang mencakup bidang Papan, kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, pemberdayaan, penguatan UMKM, dan bantuan modal., pengumpulan informasi tentang warga miskin. Infrastruktur. Adapun persamaan program-program di antara desa maju dan berkembang terdapat pada program Bantuan Langsung Tunai (BLT), cegah *stunting*, perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, peningkatan sarpras PAUD, peningkatan produksi tanaman pangan dan peternakan, pemberdayaan kaum difabel, serta pembangunan jalan desa, sanitasi dan irigasi. Beberapa program tersebut merupakan program pemerintah yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah desa. Sementara itu, perbedaan program di antara desa maju dan berkembang yaitu pada desa maju menaruh perhatian terhadap kelompok-kelompok ekonomi produktif pada sektor peningkatan usaha

mikro. Hal tersebut dikarenakan oleh inisiatif yang berbeda-beda dari masing-masing desa.

Adanya ketidakselarasan program antara RKPDes dan APBDes disebabkan oleh dinamika kebijakan dari pusat, terbatasnya anggaran. Selain itu dari segi anggaran, prioritas anggaran dari masing-masing desa terfokus pada infrastruktur, perlindungan sosial, papan, dan kesehatan. Program yang tidak menjadi prioritas dibanding lain yaitu pendidikan, pemberdayaan, dan pengumpulan informasi warga miskin. Terakhir, kendala dalam upaya pengentasan kemiskinan dari keseluruhan desa setidaknya disebabkan oleh 3 yaitu masalah yaitu data penerima bantuan yang tidak sesuai, anggaran yang terbatas, serta kultur masyarakat yang malas dan sulit berubah.

Penerapan penganggaran yang *pro-poor* tercermin dalam beberapa kriteria yang sudah disampaikan pada kesimpulan. Namun demikian terdapat hal yang perlu diperhatikan Berdasarkan kesimpulan yang ada, masih sedikitnya program-program pemberdayaan dan peningkatan UMKM. Maka dari itu, meningkatkan program-program yang mengarah kepada pemberdayaan dan pengembangan UMKM termasuk besaran anggaran pada sektor tersebut.

Referensi

- Arfiansyah, M. A 2020. 'Dampak dana desa dalam penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah', *Jurnal Lisyabab*, vol. 1, no.1, hh. 91-106. doi: <https://doi.org/10.58326/jurnal%20lisjabab.v1i1.20>
- Cahyat, A., & Moeliono, M., 2005. 'Pengarutamaan kemiskinan: Apa, mengapa dan bagaimana?', tersedia di: <https://hdl.handle.net/10568/19347> (Diakses: 5 Agustus 2022)
- Chambers, R. 1995. 'Poverty and livelihoods: whose reality counts?', *Environment and urbanization*, vol. 7, no.1, hh. 173-204. Doi: <https://doi.org/10.1177/095624789500700106>
- Drisko, J. & Maschi, T., 2016. *Content Analysis*, Oxford University Press, Oxford.
- Eriyanto 2011. *Analisis isi: Pengantar metodologi untuk penelitian ilmu komunikasi dan ilmu-ilmu sosial lainnya*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Fasya, M. N., Prayitno, G., & Subagiyo, A 2020. 'Hubungan kemiskinan dan indeks desa membangun di Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang', *Planning for Urban Region and Environment Journal (PURE)*, vol. 9, no.3, hh. 223-232. Tersedia di: <https://purejournal.ub.ac.id/index.php/pure/article/view/150/184>. (Diakses: 29 Juli 2022)
- Ikhsan, Hajad, V., Marefanda, N., Saputra, A., & Herizal. 2022. 'The special autonomy funds are not for poverty alleviation: A lesson from Aceh's

- Way', *Journal of Local Government Issues (LOGOS)*, vol. 5, no.2, hh. 161–175. Doi:<https://doi.org/10.22219/logos.v5i2.21658>.
- Kementerian Keuangan. (n.d.). *Website PEN*, Website PEN. Tersedia di: https://pen.kemenkeu.go.id/in/post/mengapa-program-pen#pen_kesehatan (Diakses: 26 Juni 2023)
- Mgomezulu, W. R., & Chitete, M. M. 2023. 'Effectiveness of pro-poor interventions on wealth accumulation and household engagement in income generation in Malawi', *Research in Globalization*, vol. 6, hh. 10012. Doi:<https://doi.org/10.1016/j.resglo.2023.100127>
- Nursini, N., Agussalim, A., Suhab, S., & Tawakkal, T. 2018. 'Implementing pro poor budgeting in poverty reduction: A case of local government in Bone District, South Sulawesi province, Indonesia'. *International Journal of Economics and Financial Issues*, vol. 8, no.1, hh. 30, tersedia di <https://www.proquest.com/scholarly-journals/implementing-pro-poor-budgeting-poverty-reduction/docview/2270048770/se-2>. (Diakses: 24 Juni 12 September 2022)
- Padriyansyah. 2015. Analisis penerapan dan perkembangan *pro-poor budgeting* di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2009-2013, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini* ,vol. 6, no. 2, hh. 20-31. doi: <https://doi.org/10.36982/jiegmk.v6i2.62>.
- Prakoso, T. S., & Suseno, P. (2022). 'Penurunan kemiskinan di Klaten tertinggi se-Soloraya, berkurang 13.360 jiwa', *Solopos Soloraya*, tersedia di: <https://soloraya.solopos.com/penurunan-kemiskinan-di-klaten-tertinggi-se-soloraya-berkurang-13-360-jiwa-1506294/amp>, (Diakses: 23 Desember 2023)
- Rustanto, B. 2015. *Menangani Kemiskinan*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Schreier, M. 2012. *Qualitative Content Analysis in Practice*, SAGE, London.
- Sugiyono 2013, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- Suharto, E., 2013. *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*, Alfabeta, Bandung.
- Waroh, Y. K., 2019. 'Pemberian makanan tambahan sebagai upaya penanganan stunting pada balita di Indonesia', *Embrio*, vol. 11, no.1, hh. 47-54. Doi:<https://doi.org/10.36456/embrio.vol11.no1.a1852>.
- Yang, Z 2019. 'Threshold effect of poverty allevation funds on human capital accumulation: A case study of impoverished counties in China', *Sustainability*, vol. 11, no. 3, hh. 809. Doi:<https://doi.org/10.3390/su11030809>